

## Pengantar Editor

ABDUL WAHID & YULIANTI

Sewaktu edisi Lembaran Sejarah ini disiapkan, Bangsa Indonesia tengah menyibukan diri untuk menyambut perayaan tahunan peringatan Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Setiap kali peringatan kemerdekaan dilakukan, sebenarnya semakin panjang bentangan jarak ingatan anak bangsa dengan periode revolusi kemerdekaan yang terjadi di periode 1945-1949 dan diingat sebagai periode paling penting dalam sejarah modern Indonesia. Dalam tulisannya di awal 1980-an, sejarawan Onghokham telah memperingatkan bahaya glorifikasi dan mitologisasi revolusi Indonesia, yang bisa mendistorsi makna sebenarnya dari periode atau peristiwa penting tersebut. Hal itu terjadi seiring mudarnya tradisi kritis dalam memahami periode penting ini dan menguatnya kecenderungan politis atau politisasi terhadap periode sejarah ini untuk kepentingan jangka pendek dari segelintir kelompok anak bangsa. Untuk menghindari kondisi tersebut, upaya kritis secara berkesinambungan dalam memahami periode sejarah tersebut, dan periode-periode sejarah lainnya, perlu terus dilakukan. Jarak waktu yang terus melebar harus diisi oleh kajian dan penelitian sejarah kritis, yang bisa menawarkan pemahaman yang beragam dan kaya akan periode tersebut dengan berdasarkan kepentingan saat ini dan masa mendatang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Lembaran Sejarah edisi ini mengangkat Revolusi Kemerdekaan Indonesia sebagai tema khusus. Penerbitan edisi khusus ini merupakan bagian dari seri publikasi hasil dari Proyek Penelitian 'Proklamasi Kemerdekaan, Revolusi, dan Perang di Indonesia, 1945-1949', kerjasama kolaboratif Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada dan KITLV Leiden. Ada enam artikel disajikan dalam edisi khusus ini, sebagian besar merupakan intisari dari hasil penelitian tugas akhir mahasiswa Sejarah Universitas Gadjah Mada. Untuk melengkapi edisi ini, Grace Leksana menyajikan sebuah review kritis atas buku *Colonial Insurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia* terbitan Routledge tahun 2014. Buku yang diedit oleh Bart Luttikhuis dan A. Dirk Moses ini adalah salah satu buku penting yang secara komprehensif menyajikan hasil penelitian para sejarawan internasional tentang kekerasan massal di Indonesia sejak periode akhir kolonial dan utamanya di periode 1945-1950 dan dampaknya bagi masyarakat Belanda dan Indonesia.

Keenam artikel tersebut mengulas berbagai aspek dari periode Revolusi yang

relatif belum banyak diungkapkan dalam kajian-kajian tentang revolusi sebelumnya atau historiografi Indonesia secara keseluruhan penting tersebut. Di antaranya adalah tentang perspektif perempuan dan pergulatan wacana terkait posisi serta kontribusi mereka terhadap revolusi, tentang upaya penggalangan dana revolusi melalui pertunjukan amal, tentang praktik catutisme dan korupsi terhadap pengumpulan padi yang seharusnya digunakan untuk menyokong perjuangan revolusi, tentang upaya pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi Belanda, tentang peran dan posisi ambigu dari organisasi Palang Merah Republik Indonesia dan Belanda selama masa perang, tentang kekerasan terhadap orang-orang Tionghoa, dan tentang politik memori terkait sosok Jenderal Soedirman dan warisan di tubuh militer Indonesia.

Artikel Galuh Ambar Sasi menjadi pembuka wacana dengan menyajikan pembahasan tentang bagaimana kaum perempuan memaknai dan memposisikan dirinya dalam kancah revolusi. Berangkat dari kesadaran kritisnya tentang historiografi Indonesia yang lebih banyak menuliskan posisi kaum perempuan pada masa revolusi senantiasa dalam konteks organisasi perempuan, mobilisasi untuk perang dan logistik, keterlibatan dalam Palang Merah dan organisasi kelaskaran; Galuh mencoba membangun narasi baru sejarah organisasi perempuan dengan memfokuskan perhatian pada dinamika internal organisasi perempuan di fase-fase awal pendiriannya. Ia mempertanyakan bagaimana para perempuan yang tergabung dalam organisasi ini memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia selama lima bulan pertama sejak pendirian Perwari pada akhir tahun 1945. Secara khusus Galuh menyoroti kegiatan para perempuan yang tergabung dalam Perwari, sebuah organisasi induk bagi perempuan Indonesia pada masa revolusi. Perwari sendiri merupakan gabungan dari dua organisasi perempuan lainnya yaitu Perwani dan Wani yang berbasis di Yogyakarta. Debut pertama Perwari adalah menyampaikan pidato tentang kaum perempuan dan perjuangan kemerdekaan. Selain itu, dalam perkembangannya para perempuan anggota Perwari juga terlibat langsung dalam pemenuhan kebutuhan logistic bagi para pejuang Republik Indonesia. Menurut Galuh, para anggota Perwari memaknai kemerdekaan dengan cara melibatkan diri mereka pada usaha bela negara, selain dengan melakukan pemberdayaan diri dan keluarga pada masa perang kemerdekaan. Bagi Perwari momentum kemerdekaan harus menjadi titik balik kesetaraan bagi kaum perempuan sebagai warga negara baru Indonesia yang merdeka.

Aspek pembiayaan perjuangan di pihak Republik Indonesia adalah isu menarik dan penting lainnya yang belum banyak terungkap dalam historiografi revolusi Indonesia. Dalam artikel kolaboratifnya, Ihza Arvianita dan Yuli Eko Basuki menguraikan pentingnya pertunjukan amal sebagai strategi pengumpulan dan mobilisasi dana, selain melalui perdagangan dan penyelundupan, bagi Pemerintah Republik Indonesia. Dengan mengambil Yogyakarta sebagai studi kasus, kedua penulis tersebut menunjukkan keterlibatan masyarakat dan badan-badan perjuangan dalam menyelenggarakan pertunjukan sandiwara dan seni tradisional sebagai cara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Salah satu contoh pertunjukan amal tersebut adalah pertunjukan sandiwara bertajuk “pemberontakan Rakjat” yang diselenggarakan oleh Rukun Kampung Djogonegaran. Pendapatan dari pertunjukan tersebut, selanjutnya disalurkan pada Fonds Kemerdekaan dan Laskar Rakyat Djogonegaran. Pada tahun 1947, jumlah pertunjukan amal yang diselenggarakan berkembang tidak hanya

berupa pertunjukan sandiwara tetapi juga dalam bentuk pertunjukan film dan seni keroncong. Hasilnya, pemasukan dana hibah untuk Fonds Kemerdekaan mengalami peningkatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pada periode awal revolusi kemerdekaan, pertunjukan amal yang selenggarakan oleh rakyat menjadi salah satu penopang finansial yang penting bagi badan-badan perjuangan di Yogyakarta. Selain itu, artikel ini juga menegaskan fakta bahwa mereka yang tergabung dalam laskar rakyat tidak hanya berjuang di garis depan pertempuran, tetapi juga mencari sendiri sumber dana untuk membiayai perjuangan mereka.

Masih terkait dengan pembiayaan perjuangan Republik Indonesia, Lesta Alfatiana dan Ayu Wulandari menyajikan pembahasan menarik tentang upaya Pemerintah Republik Indonesia selama periode revolusi mengisi kas negara untuk membiayai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam artikelnya tersebut, kedua penulis menginvestigasi berbagai upaya dan kendala yang dihadapi Pemerintah Republik dalam mengisi kas negara, terutama blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, khususnya di Sumatera. Salah satu upaya terpenting yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia adalah mengekspor sejumlah komoditas perkebunan melalui jalur perdagangan gelap atau penyelundupan, terutama ke Singapura, sebelum disebarkan ke beberapa negara lain di Asia dan Eropa. Salah satu contoh dari misi perdagangan gelap yang sukses dilakukan adalah apa yang dikenal sebagai “Operasi Meriam Mee”, yang berhasil menyelundupkan 100 ton Gula ke Singapura. Keberhasilan perdagangan gelap ini sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, khususnya yang berasal dari INDOFF (*Indonesian Office*). Di antara beberapa tokoh INDOFF yang memegang peran kunci dalam misi perdagangan sekaligus pengawasan terhadap perdagangan gelap adalah Ali Djajengprawira, dan kemudian dilanjutkan oleh Utoyo Ramlan. Selain keduanya terdapat Suryono Darusman, seorang anggota militer yang berperan besar dalam Operasi Meriam Bee untuk menjual gula dan kemudian membelanjakan hasil penjualannya itu untuk membeli senjata dan perlengkapan militer. Demikianlah, kedua penulis mengungkapkan situasi negara baru Indonesia pada masa revolusi yang harus menghadapi tantangan berupa perang melawan Belanda, tetapi juga permasalahan mendasar lainnya yaitu bagaimana mendapatkan dana untuk membiayai usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraihinya.

Selain isu perekonomian dan pembiayaan perjuangan Pemerintah Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, isu-isu terkait posisi dan fungsi dari lembaga kemanusiaan, khususnya Palang Merah adalah tema lain yang diangkat dalam edisi khusus ini. Artikel Rizky Eka Saputra menjadi satu-satunya artikel yang membahas tentang peran krusial dari lembaga kemanusiaan Palang Merah selama periode revolusi kemerdekaan. Kedua pihak yang berkonflik sama-sama memiliki organisasi Palang Merah untuk mendukung kekuatan militernya masing-masing. Organisasi Palang Merah tersebut, sebenarnya berasal dari satu organisasi induk yang sudah ada sejak periode kolonial, yaitu *Netherlands Indische Rode Kruis* (NIRK). Pada masa revolusi kemerdekaan, organisasi tersebut terpecah menjadi dua, yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) dan *Nederlandsche Roode Kruis afdeling Indonesië* (NERKAI). Kedua organisasi ini bergerak di Jawa selama Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, baik di medan pertempuran, maupun di luar medan pertempuran. Dalam prakteknya, artikel ini menunjukkan bahwa PMI dan NERKAI memiliki posisi dilematis

dalam menjalankan fungsinya di lapangan. Kedua organisasi menjalankan fungsi ganda, yaitu selain menjalankan tugas kemanusiaan dan medis, keduanya juga melakukan fungsi politis, yaitu di antaranya melakukan spionase, propaganda, dan diplomasi. Semua fungsi terakhir itu tentu saja dimaksudkan untuk memperkuat posisi masing-masing pemerintahan yang sedang bertikai. Kondisi tersebut mengakibatkan kedua organisasi tidak dapat bekerja secara netral. Dalam artikelnya tersebut, penulis berhasil mengidentifikasi beberapa penyebab dari dualisme fungsi dari kedua organisasi kemanusiaan tersebut, yaitu status istimewa Palang Merah, kaburnya prinsip independen Palang Merah, adanya sentimen nasionalisme di kedua pihak, dan pengaruh militerisme di tubuh Palang Merah.

Keberadaan dan fungsi organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah pada masa revolusi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan, mengingat maraknya aksi kekerasan selama periode revolusi yang dilakukan tidak saja oleh kekuatan militer dari kedua belah pihak yang berkonflik, tetapi juga oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata terhadap kelompok sipil lainnya yang secara politik lemah. Artikel Geza Surya Pratiwi dalam edisi khusus ini, yang menginvestigasi kekerasan terhadap kelompok Tionghoa di Kota Malang, Jawa Timur, menjadi sumbangan penting untuk memahami kompleksitas realitas pada masa revolusi di tingkat daerah. Secara spesifik, artikel ini berargumen bahwa kekerasan yang terjadi terhadap golongan Tionghoa memiliki akar yang panjang sejak masa kolonialisme Belanda. Pada masa penjajahan Jepang yang singkat, kelompok penduduk Tionghoa mengalami proses pen-Cinaan kembali sehingga membuat hubungan mereka menjauh dengan penduduk pribumi. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok laskar rakyat terhadap orang-orang Tionghoa di Kota Malang dipicu oleh anggapan bahwa mereka telah menerima keuntungan secara ekonomi dan politis pada masa kolonial Belanda. Selama periode revolusi, loyalitas orang-orang Tionghoa terhadap Republik dipertanyakan seiring beredarnya rumor tentang adanya kelompok Tionghoa yang menjadi mata-mata dan kolaborator pihak Belanda. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya aksi kekerasan terhadap orang-orang Tionghoa karena mereka dianggap tidak mendukung jalannya revolusi. Namun demikian, gelombang kekerasan terhadap orang Tionghoa di kota Malang tersebut sebenarnya terpicu oleh Agresi Militer Belanda pada 21 Juli 1947 dan pada bulan Desember 1948. Perubahan politik, pergantian atau perebutan kekuasaan serta kekacauan yang mengikutinya pada masa revolusi, menempatkan kelompok minoritas seperti orang-orang Tionghoa dalam posisi yang rentan untuk menjadi target kekerasan dari kelompok-kelompok yang bertikai.

Sedikit berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya, tulisan Satrio Dwicahyo tentang Jenderal Sudirman menekankan tentang pentingnya warisan sejarah (*heritage*) dan ingatan tentang revolusi kemerdekaan, bagi pembentukan identitas nasional Indonesia dan norma-norma nilai dalam lingkup organisasi kenegaraan, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam artikelnya, Satrio Dwicahyo berpendapat bahwa kenangan atau memori tentang perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman digunakan oleh para tokoh politik Indonesia untuk membangun narasi sejarah baru. Menurutnya, kebesaran dan ketokohan Jenderal Sudirman selama masa perang kemerdekaan tidak berhenti ketika ia wafat. Sebaliknya, para tokoh politik dan organisasi militer untuk alasan pragmatis mereka menghidupkan kembali kebesaran Jenderal Sudirman bahkan jauh setelah sang Jenderal meninggal dunia.

Sebagai contoh, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan nama sang Jenderal untuk mengendalikan perpecahan yang terjadi antara PETA dan *ex-tentara* kolonial Belanda (KNIL). Bukan tanpa alasan, pengaruh sang Jenderal semasa hidup dianggap mampu meredakan konflik yang sama antara kedua organisasi tersebut. Bahkan dua tokoh politik besar nasional sekaliber Sukarno dan Suharto, keduanya juga berusaha untuk menggunakan pengaruh Jendral Sudirman untuk kepentingan politik pragmatis mereka. Sukarno berusaha mengambil ketokohan Sudirman sebagai seorang nasionalis untuk mempromosikan kebijakan Nasakom, yang diusungnya. Demikian pula hanya Suharto, ketika berkuasa pada masa Orde Baru, berusaha keluar dari bayang-bayang pengaruh Sukarno dengan mengangkat ketokohan Sudirman sebagai tokoh tandingan, sekaligus untuk menghapus memori kolektif masyarakat akan kebesaran Sukarno. Sangat bisa dikatakan bahwa ketokohan Sudirman pada periode pasca revolusi tidak pernah mati dan terus melahirkan reproduksi narasi sesuai dengan intensi politik dari rezim penguasa.

Demikianlah, keenam artikel tersebut menampilkan beberapa aspek menarik dari periode revolusi yang masih perlu dieksplor untuk melengkapi gambaran tentang revolusi kemerdekaan Indonesia yang lebih lengkap. Realitas kekerasan yang dialami oleh kelompok Tionghoa sudah banyak dikaji, namun implikasi sosial-ekonomi yang menyertainya seperti perampasan aset dan properti, ruang hidup, masih banyak belum terungkap. Kemudian, dimensi psikologis-intelektual dari aktivisme kaum perempuan tentang dan terkait revolusi kemerdekaan harus dikembangkan hingga level mikro dan menyentuh kehidupan sehari-hari mereka. Keberadaan lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah menjadi penting di tengah dominasi narasi tentang kekerasan; serta sejauh mana lembaga-lembaga semacam itu bisa menjawab tantangan untuk menerapkan secara konsisten fungsi dan norma universal yang harus diembannya di lapangan. Terakhir, tidak kalah penting adalah penyajian aspek-aspek finansial dan ekonomis dari revolusi kemerdekaan Indonesia, terutama bagaimana Pemerintah Republik Indonesia mencari sumber pembiayaan untuk membiayai jalannya pemerintahan, mempersenjatai angkatan perang dan badan-badan perjuangan, dan menjalankan diplomasi internasional. Termasuk di dalam proses tersebut adalah mobilisasi partisipasi rakyat dan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan alternatif melalui jalur non-konvensional, termasuk melalui penyelundupan atau cara lain yang dalam kondisi normal bisa dikategorikan sebagai aktivitas ilegal.

Namun demikian, hal terpenting yang disajikan keenam artikel tersebut secara keseluruhan adalah upaya para penulisnya untuk keluar dari cara pandang nasionalistik yang mendominasi wacana sejarah nasional dan menjadi arus utama historiografi revolusi Indonesia. Selain itu, para penulis juga menawarkan cara pandang yang lebih realistis dan 'grounded', melalui studi kasus lokal, menyajikan dinamika sosial ekonomi yang lebih berwarna dari periode revolusi, khususnya di Jawa bagian tengah, dimana denyut jantung revolusi dirasakan dan mempengaruhi hampir seluruh kehidupan masyarakat. Dengan penerbitan Lembaran Sejarah edisi khusus revolusi kemerdekaan Indonesia ini, kajian-kajian sejarah baru dengan mengusung perspektif dan semangat yang serupa bisa terus tumbuh di kalangan generasi muda sejarawan Indonesia. Jika itu terwujud, maka penambahan jarak waktu dan usia memori tentang periode sejarah penting tersebut dapat meminimalisir

kecenderungan terjadinya 'amnesia sejarah' dan 'kemalasan intelektual-akademis' yang berujung pada mitologisasi dan politisasi wacana serta warisan revolusi kemerdekaan Indonesia di masa kini dan mendatang.